

BAB II

KONSEP PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Pengertian Perkawinan

Nafsu biologis adalah kelengkapan yang diberikan Allah kepada manusia, namun tidak berarti bahwa hal tersebut dapat dilampiaskan secara sembarangan. Islam tidak melarangnya, membunuh atau mematikan nafsu tersebut, sebab nafsu itu penting juga artinya bagi kehidupan manusia. Namun Islam adalah mendidik, membimbing, memelihara dan mengarahkan nafsu tersebut, agar selalu hidup berjalan ke arah segala kebaikan dan yang diridhoi Allah SWT.¹ Caranya adalah melalui perkawinan.

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.³

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, maka pada

¹ Ashadi Falih dan Cahyo Yusuf, *Akhlaq Membentuk Pribadi Muslim*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1985), hlm. 58.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 9.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1980), hlm. 11.

dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipal. Adapun pengertian perkawinan menurut undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan seorang pria dan seorang wanita harus ada ikatan lahir dan ikatan batin secara terpadu. Ikatan lahir batin itu harus ada, ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, tidak dapat dilihat namun tetap harus ada. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal.⁵

Sedangkan perkawinan menurut Ali Afandi adalah suatu persetujuan antara seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga atau kekeluargaan.

6

Dari berbagai definisi di atas baik menurut hukum Islam maupun hukum umum pada prinsipnya sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia sejahtera serta kekal.

B. Asas Perkawinan

Sudah menjadi ketentuan Ilahi manusia mempunyai hasrat untuk melangsungkan keturunannya. Hasrat untuk melangsungkan keturunan dalam diri pribadi manusia biasa diwujudkan dalam bentuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang disebut dengan perkawinan. Dari

⁴ *Ibid*, hlm. 11.

⁵ Suhardana, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hlm. 89.

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 98.

hidup bersama diantara keduanya itu kemudian lahir anak-anak keturunan mereka yang akan meneruskan generasi-generasi terdahulunya secara sambung menyambung.

Dengan demikian setiap pernikahan yang sah, akan berakibat terhadap keturunan yang sah pula. Di dalam pernikahan tersebut suami dan isteri mempunyai kewajiban yang sama terhadap keturunannya, yaitu memelihara, memberi nafkah dan mendidiknya hingga anak itu dewasa.⁷

Hidup bersama dalam perkawinan yang biasa disebut dengan keluarga mempunyai akibat-akibat yang penting di dalam masyarakat. Unsur pembentuk masyarakat adalah hidup bersama dalam bentuk keluarga. Diantara keluarga sebagai unsur pembentuk masyarakat ini terjadi hubungan timbal balik yang erat satu dengan yang lain. Hubungan yang demikian terjadi karena diantara keluarga tersebut terdapat kepentingan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, sehingga apabila tidak ditertibkan akan banyak menimbulkan permasalahan.

Akibat-akibat hidup bersama dalam perkawinan ini dapat dilihat misalnya apabila keduanya resmi sebagai suami istri maka kemudian mereka menyendirikan diri membentuk keluarga baru yang terpisah dengan keluarga asal. Lebih jauh lagi apabila kemudian telah lahir anak-anak keturunan mereka. Untuk ini maka sangat diperlukan peraturan-peraturan yang dapat mengatur dan menertibkannya.

Pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang yang dapat mengatur dan menertibkan hal-hal yang berkaitan dengan

⁷ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), hlm. 22.

perkawinan. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun asas-asas perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut adalah :

1. Pengertian Perkawinan (Pasal 1)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁸

2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) dan (2)).

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran

⁸ Penjelasan Pasal 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami.⁹

Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang ini dan telah diputuskan oleh Pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, undang-undang ini menentukan batas minimal umur untuk kawin yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)). Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami maupun calon isteri yang masih di bawah umur.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita dalam melaksanakan perkawinan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.¹⁰

5. Mempersulit perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia,

⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)

¹⁰ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Sipta, 1991), hlm. 8.

kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹¹

6. Untuk selamanya

Maksud dan tujuan perkawinan adalah supaya suami dan isteri hidup bersama selamanya, maka harus ada persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak (Pasal 6 ayat (1)).

C. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa : perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 2 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 berbunyi:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam,

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 6.

dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Menurut penjelasan pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi atau pejabat yang membantunya.

Syarat-syarat Melangsungkan Perkawinan :

Mengenai syarat-syarat perkawinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, syarat-syarat ini antara lain :

1. Syarat materiil
 - a. Syarat materiil absolut
 - b. Syarat materiil relatif
2. Syarat formal
 - a. Sebelum perkawinan dilangsungkan
 - b. Pada saat perkawinan dilangsungkan

Syarat materiil absolut adalah syarat yang mengenai pribadi seorang yang melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1974 bahwa, pada azasnya dalam suatu peristiwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 selaras dengan

ketentuan pasal 27 KUHPdata yang menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.

Pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terdapat ketentuan pengecualian yang menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pasal ini memberi kesan bahwa setiap suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang, walaupun lebih dulu harus minta izin pada pengadilan dan telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berbunyi bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Bagi pemeluk agama Islam, perkawinannya dilangsungkan dalam pengadilan agama. Sedangkan bagi agama lain perkawinannya dilangsungkan dalam pengadilan negeri.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pengadilan dimaksud dalam ayat 1 diatas hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ini semua telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974. Mengenai persetujuan antara kedua calon suami isteri diatur dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974. Bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apabila syarat ini dilanggar maka perkawinan ini dapat ditentang atau dapat dicegah.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya lebih dahulu. Hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Perkawinan harus didasarkan pada usia yang cukup menurut Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 dan KUHPdata, anak dianggap dewasa apabila berumur 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Menurut KUHPdata untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi pihak pria sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan bagi pihak wanitanya berumur 15 tahun.

Apabila kedua calon pengantin itu usianya belum mencukupi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, maka harus minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita supaya dapat melangsungkan perkawinan. Ini berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Sedangkan dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Apabila wali atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak ada atau tidak cakap atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat dimintakan kepada pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil relatif adalah syarat yang mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu.¹²

Dalam melakukan perkawinan ada perkawinan yang dilarang dilakukan seperti yang termuat di dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu datau bapak tiri.
- d. Berhubungann susuan, yaitu orangtua susuan, saudara susuan dan bibi susuan.

¹² Suhardana, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hlm. 93.

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 mengatur seorang janda yang hendak kawin lagi. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.

Syarat formil sebelum dilangsungkan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 9 tahun 1975 pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Sedangkan dalam pasal 3 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Dalam hal pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 di atas dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ini berdasarkan pasal 3 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975.

Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 di atas disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975.

Menurut pasal 4 PP No. 9 tahun 1975, pemberitahuan tentang

kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orangtua ataupun wakilnya.

Pemberitahuan tersebut memuat nama calon kedua mempelai yang harus sesuai dengan akta kelahiran, umur / bulan / tahun kelahiran, agama atau kepercayaan yang dianutnya, pekerjaan kedua mempelai, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. Ini diatur dalam pasal 5 PP No. 9 tahun 1975.

Pasal 6 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi apa tidak.

Apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi dan tidak ada sesuatu halangan perkawinan maka Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Hal ini diatur dalam pasal 8 PP No. 9 tahun 1975.

Syarat formil perkawinan dilangsungkan pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya atau kepercayaannya masing-masing.

Menurut pasal 10 PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan tentang tata cara perkawinan yaitu :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman perkawinan itu diumumkan.

2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dalam pasal 11 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Bagi orang yang beragama Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Suatu akad perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan ketentuan agama dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan itu adalah, adanya calon mempelai pria dan wanita, ada wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah.¹³

Namun perlu diperhatikan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan sepasang calon suami dan isteri harus sudah cukup dewasa sehat jasmani dan rohani serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 30.

kebutuhan keluarga.

Undang-Undang Perkawinan Nasional menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut agar suami dan isteri yang akan kawin itu telah dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi adanya "kawin paksa", oleh karena itu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.¹⁴ Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak ini sangat penting sekali untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan khususnya apabila dilihat dari pihak calon isteri hal ini adalah sesuai dengan persoalan emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat sekarang mempunyai kebebasan dalam

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 45.

menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.¹⁵

Pasal 6 ayat (1) ini oleh Prof. Dr. Hazairin, SH. Diberi komentar sebagai berikut : Pasal 6 ayat (1) mengandung suatu prinsip kebebasan, kemauan yang sangat baik. Buat umat Islam ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.¹⁶

2. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1).

Dalam Pasal 29 KUH Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai 18 tahun begitu pula pemuda yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat tali pernikahan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun kedua undang-undang itu menetapkan adanya batas umur perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda dan pemuda yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar telah masak jiwa dan raganya dalam bentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda, dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, juga dapat menekan laju kelahiran yang cepat yang akan berakibat penambahan penduduk yang cepat pula.¹⁷ Kalau umur calon suami isteri tidak diketahui mereka tidak boleh kawin kecuali apabila dapat

¹⁵ Soemiyati, *op. cit.*, hlm 68.

¹⁶ Bakri A. Rahman dan Ahmad Suharja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), hlm. 32.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 51.

dipastikan bahwa umur mereka sudah cukup.¹⁸

3. Mendapat izin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)).

Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orangtua lagi atau orangtua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena berpenyakit, kurang akal, sakit ingatan dan lain sebagainya, maka izin dimaksudkan cukup dari orang yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3-4)).

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut, diantara orangtua yang masih hidup, orangtua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan mereka, maka izin diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu (Pasal 6 ayat (5)).

Mengenai perlunya izin ini adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggung jawab orangtua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anaknya. Sehingga kebebasan

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 77.

anak dalam memilih pasangan hidupnya jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orangtua.¹⁹

4. Antara kedua calon suami isteri tidak ada larangan perkawinan (Pasal 8)
5. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan lain kecuali bagi calon suami apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang.
6. Antara kedua calon mempelai tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain (Pasal 10).

Dalam hal ini bagi orang Islam boleh kawin dengan perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga kali tetapi telah kawin dengan laki-laki lain secara baik, kemudian telah terjadi perceraian dan sudah habis masa iddahnyanya.

7. Telah lepas dari masa iddah atau jangka waktu tunggu karena putusnya perkawinan (Pasal 11).

Mengenai waktu tunggu ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) yaitu :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, sedangkan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 66.

D. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu peristiwa besar yang alamiah yang dialami oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dalam kehidupan manusia perkawinan adalah suatu kebutuhan hidup dan juga merupakan lembaga yang diatur sah oleh seluruh masyarakat sejak zaman dahulu, sekarang dan dimasa yang akan datang.

Perkawinan merupakan hal yang sifatnya kodrati berhubungan dengan kebutuhan untuk melangsungkan keturunan. Oleh karena itu Pemerintah telah mengeluarkan suatu aturan yang berkaitan dengan perkawinan yaitu Undang-undang No. 1/1974. Di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal diperlukan banyak hal untuk mewujudkan tujuan tersebut, diantaranya diperlukan kesiapan lahir batin. Kesiapan lahir seperti keadaan jasmani yang akan melakukan perkawinan umpamanya yang berkaitan dengan umur.

Kesiapan batin misalnya pada perkawinan yang dipaksa oleh orang tua, karena diantara mereka tidak ada rasa kasih sayang, maka sangat mungkin sekali akan terjadi percekcoan dalam rumah tangga mereka. Apabila percekcoan ini tidak bisa didamaikan maka akan berlanjut pada perceraian.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri

perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah perbuatan maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.²⁰

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.²¹

Tujuan perkawinan yang lain untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinahan ataupun pelacuran. Apabila tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang.²²

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 24.

²¹ *Ibid*, hlm. 24.

²² *Ibid*, hlm. 24.